

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024**

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro
Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,76	71,37	0,61 Poin
2.	Angka Kemiskinan	11,21	10,82	-0,39 Persen Poin
3.	Angka Pengangguran	4,12	4,01	-0,11 Persen Poin
4.	Pertumbuhan Ekonomi	6,15	6,38	0,23 Persen Poin
5.	Pendapatan per Kapita	31,14	34,23	9,92 Persen
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,342	0,354	0,012 Poin

Sumber data : BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

1. Urusan Pendidikan

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan
Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	80,99	92,77
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90,90	91,53
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	85,11	94,44
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	44,21	52,99

B) Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 543.381.648.711** serapan 97,07% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

**Tabel 1.3
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan
Tahun 2024**

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Serapan(%)
1.	Program SPM pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	36.970.379.100	36.943.443.850	99,92
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	31.055.190.900	31.037.061.650	99,94
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	5.400.000.000	5.391.300.000	99,84
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	515.188.200	515.082.200	99,98
2.	Program SPM pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	509.720.349.417	493.834.169.611	96,88
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	274.230.064.707	270.458.344.050	98,62
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	231.168.736.410	219.313.667.861	94,87
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	4.321.548.300	4.062.157.700	93,99

3.	Program pendidikan Kesetaraan	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	13.314.480.000	12.837.509.700	96,41
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	12.846.480.000	12.514.109.700	97,41
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	468.000.000	323.400.000	69,10
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (PAUD,SD/MI,SMP/MTs,Kesetaraan)	349.949.600	340.274.600	97,24
TOTAL			559.780.342.067	543.381.648.711	97,07

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Capaian pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jenjang PAUD, SD dan SMP belum maksimal (100%). Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia yang sekolah yang belum bersekolah, lulus tidak melanjutkan, dan putus sekolah (DO).
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 5-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan karena belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.
5. Pemenuhan kebutuhan alat tulis dan kelengkapan siswa belum mencapai sasaran dengan sempurna dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.

2. Urusan Kesehatan

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,80	0,68
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	83,33	100
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99,84	83,09
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	82,60
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	86,89
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	96,12
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,72	93,32
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	43,49	86,41
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,61	101,60
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99,54	100

B) Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 12.354.418.600** serapan 99,84% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan
Tahun 2024

Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Pelayanan Ibu hamil	-	-	-
Pengelolaan pelayanan ibu bersalin	4.073.190.000,00	4.073.190.000,00	100,00
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	193.791.774,00	183.750.000,00	94,82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.000.000,00	34.999.600,00	100,00
Pengelolaan pelayanan pada pendidikan usia sekolah dasar	35.000.000,00	34.999.600,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	25.562.500,00	24.630.000,00	96,35
Pengelolaan pelayanan kesehatan Lanjut usia	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	42.525.000,00	42.525.000,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.642.144.550,00	4.633.660.000,00	99,82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	52.825.000,00	52.825.000,00	100,00
Pengelolaan pelayanan terhadap terduga TBC	2.638.342.900,00	2.638.342.900,00	100,00
Pengelolaan pelayanan terhadap berisiko tertular HIV	625.096.500,00	625.096.500,00	100,00
Total	12.373.878.224,00	12.354.418.600,00	99,84

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Capaian berdasar estimasi, jika ke sasaran riil capaian mencapai 100% artinya setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar.
2. Masih ada ibu bersalin di tolong oleh tenaga kesehatan tapi di tempat Non Fasilitas kesehatan (dirumah) terutama di daerah dengan letak geografis dan akses yang sulit di jangkau seperti daerah malausma, lemahsugih dan lain sebagainya.
3. Masih ada kasus kematian neonatal.
4. Pelaksanaan tumbuh kembang belum optimal.
5. Pemeriksaan kesehatan secara berkala belum optimal.
6. Pelayanan Rujukan belum optimal.
7. Belum semua Puskesmas menerapkan PANDU PTM (Pelayanan terpadu penyakit tidak menular).
8. Belum optimalnya sistem informasi PTM (SIPTM) sebagai standar sistem pencatatan indikator pelayanan kesehatan usia produktif
9. Belum adanya integrasi data dengan Rumah Sakit dan Balai Pengobatan Swasta.
10. Anggaran kesehatan yang tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah sasaran yang sangat besar.
11. Ketersediaan Obat Jiwa (Antipsikotik, Antikolinergik, dll).
12. Dukungan lintas sektor terkait.
13. Masih ada lansia yang belum kontak dan belum mendapatkan pelayanan kesehatan sekitar 12,19%.
14. Pelaksanaan pengkajian Paripurna pada Geritari (P3G) di puskesmas belum optimal.
15. Pelayanan Perawatan Jangka Panjang (PJP) pada lansia belum optimal.
16. Sarana dan prasana alat penunjang pelayanan terbatas.
17. Pemantauan berkala terhadap semua sasaran penderita hipertensi belum optimal
18. Kondisi sosial ekonomi penderita yang tidak memiliki jaminan kesehatan
19. Dokumen kependudukan ODGJ yang tidak lengkap.
20. Tingginya jumlah penderita TB Paru.
21. Belum maksimalnya penjarangan terduga TBC di semua Faskes tersebut ada keraguan dari pasien untuk mengunjungi Faskes dan ada juga rasa ketakutan dari petugas untuk sering melakukan kontak langsung dengan pasien sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal, yaitu penjarangan secara aktif case finding tidak dilakukan, hanya menunggu terduga yang datang ke Faskes, begitu juga pelacakan dan pemeriksaan kontak erat (investigasi kontak erat) penderita TBC tidak dilakukan secara maksimal.
22. Kader TB dari NGO yang telah dilatih kurang berdaya baik secara kuantitas maupun kualitas.
23. Belum terbentuknya kerjasama antara Puskesmas dengan Klinik Sawasta & Dokter Praktek Swasta/Mandiri.
24. Tingginya jumlah kasus berisiko HIV.
25. Kemungkinan tidak maksimalnya Puskesmas dalam pelayanan ibu hamil dikarenakan tidak terjalinnya koordinasi yang baik diantara bidan desa dan klinik swasta yang menangani ibu hamil.
26. Masih ada beberapa Puskesmas yang belum maksimal dalam penginfutan data ke SIHA dikarenakan tidak adanya laptop/ komputer untuk menginfut data SIHA.
27. tidak sinkronnya anatara data HIV di SIHA dan data TB di SITB.
28. Masih ada ODHA yang Lost To Follow Up dan ODHA yang belum akses dalam pengobatan ARV dikarenakan jarak ke layanan PDP HIV yang jauh dan membutuhkan biaya buat transportasi.

3. Urusan Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	71,31	71,31
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71,31	201,09
3.	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	80	100

B) Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

Realisasi belanja urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 16.193.091.000** serapan 84,99% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 1.7
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Serapan
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	15.499.477.000	12.648.357.000	81,61%
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	3.413.324.000	3.404.734.000	99,75%
3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	140.000.000	140.000.000	100%
TOTAL			19.052.801.000	16.193.091.000	84,99%

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Data rumah korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga rehabilitasi rumah bagi korban bencana dilakukan sesuai regulasi rutilahu regular dan untuk pelaksanaan tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena keterbatasan anggaran.

4. Urusan Trantibumlinmas

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan trantibumlinmas yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Capaian Kinerja Outcome Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	0,41
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	50,81	100
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12,12	19,93

B) Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

Realisasi belanja urusan trantibumlinmas di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 11.846.487.885** serapan 97,38% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 1.9
Alokasi Anggaran Urusan Trantibumlinmas
Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Serapan
1.	<i>Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum)</i>	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.271.218.200	9.249.801.335	90,06
2.	<i>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran</i>	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	960.862.700	959.877.300	99,90
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.369.564.000	1.363.574.000	99,56
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273.240.000	273.235.250	100,00
TOTAL			12.874.884.900	11.846.487.885	97,38

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS yang sesuai dengan Permendagri No. 121 Tahun 2018, belum tercantum secara utuh dan spesifik di dalam RPJMD maupun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
3. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUM LINMAS dan Pemadam Kebakaran dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

5. Urusan Sosial

A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10
Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	<i>Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	75,51	100
2.	<i>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten</i>	100	100

B) Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.554.292.200** serapan 99,99% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

Tabel 1.11
Alokasi Anggaran Urusan Sosial
Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Serapan
1.	<i>Program rehabilitasi sosial</i>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.282.228.200	1.281.928.200	99,98
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	272.364.000	272.364.000	100
TOTAL			1.554.592.200	1.554.292.200	99,99

C) Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penghitungan pencapaian mutu SDM yang dipersyaratkan berbanding terbalik dengan realisasinya, dimana dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tercantum semakin besar data yang tercatat dan semakin besar penganggaran maka hasil capaian mutu akan memperoleh nilai besar, sedangkan realitanya data terlantar yang ada memang jumlahnya minim demikian juga penganggarannya sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nilai lebih banyak;

- b. Idealnya semakin data terlantar yang ada maka mencerminkan semakin aman dan nyaman lingkungan dan wilayahnya demikian semakin sedikit anggaran yang diajukan maka semakin efisien pelaksanaannya karena semua layanan telah dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas sosial dengan melakukan sinergi dan koordinasi intensif antar perangkat daerah, kiranya untuk beberapa layanan dasar khusus bidang sosial diberikan perlakuan yang berbeda baik dari sisi penanganan, pembiayaan dan penghitungan capaian mutu pelayanan sehingga kinerja bidang sosial bisa terlihat penanganannya berhasil 100% dengan berbagai inovasi bahkan bisa lebih efisien dari sisi anggaran.

3. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 Nomor 44A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 Kabupaten Majalengka berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian predikat (WTP) yang berarti 9 kali WTP dari tahun 2015 s.d 2023.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Unaudited Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 mencapai sebesar **Rp. 3.131.783.171.226,88** (96,32%) dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 mencapai **Rp. 3.179.987.890.985,00** (96,03%).

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.12
Ringkasan Laporan Realisasi APBD
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4.1.1	Pajak Daerah	172.578.996.000,00	167.149.914.498,00	96,85
4.1.2	Retribusi Daerah	362.239.250.810,00	339.530.230.785,00	93,73
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.235.616.793,00	8.235.616.793,00	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	35.388.048.305,00	9.603.950.110,88	27,14
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	578.441.911.908,00	524.519.712.186,88	90,68
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.360.463.935.935,00	2.314.564.304.781,00	98,06
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	114.036.864.935,00	96.243.204.000,00	84,40
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.261.174.245.000,00	1.255.452.403.615,00	99,55
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	175.224.990.000,00	168.996.421.083,00	96,45
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	464.792.710.000,00	448.637.150.083,00	96,52
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.015.228.809.935,00	1.969.329.178.781,00	97,72
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
4.2.1.5.1	Dana Desa	333.449.644.000,00	333.449.644.000,00	100,00
4.2.1.6.1	Insentif Fiskal	11.785.482.000,00	11.785.482.000,00	100,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	345.235.126.000,00	345.235.126.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	312.597.465.447,00	292.699.154.259,00	93,63
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	215.613.606.033,00	195.976.481.679,00	90,89
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	96.983.859.414,00	96.722.672.580,00	99,73
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar	312.597.465.447,00	292.699.154.259,00	93,63
	Jumlah Total Pendapatan Transfer	2.673.061.401.382,00	2.607.263.459.040,00	97,54
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00

4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.251.503.313.290,00	3.131.783.171.226,88	96,32
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.1	Belanja Pegawai	1.358.556.839.872,00	1.312.106.230.758,00	96,58
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	948.488.937.836,00	888.816.101.149,00	93,71
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	88.451.788.000,00	87.696.569.800,00	99,15
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.230.000.000,00	4.230.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.399.727.565.708,00	2.292.848.901.707,00	95,55
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.000.164.986,00	996.047.000,00	99,59
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.104.207.989,00	119.283.638.139,00	96,12
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.950.705.450,00	117.335.792.151,00	93,91
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.137.357.430,00	161.223.113.930,00	97,63
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.978.697.350,00	12.973.445.250,00	99,96
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	475.340.000,00	373.437.500,00	78,56
	JUMLAH BELANJA MODAL	428.646.473.205,00	412.185.473.970,00	96,16
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.323.502.586,00	722.246.400,00	8,68
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	8.323.502.586,00	722.246.400,00	8,68
	JUMLAH BELANJA	2.836.697.541.499,00	2.705.756.622.077,00	95,38
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	13.000.000.000,00	12.999.999.800,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	461.902.157.978,00	461.231.269.108,00	99,85
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	474.902.157.978,00	474.231.268.908,00	99,86
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.311.599.699.477,00	3.179.987.890.985,00	96,03
	SURPLUS / (DFISIT)	(60.096.386.187,00)	(48.204.719.758,12)	80,21
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.096.386.187,00	60.096.386.187,04	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.096.386.187,00	60.096.386.187,04	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00

	PEMBIAYAAN NETTO	60.096.386.187,00	60.096.386.187,04	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	11.891.666.428,92	100,00

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan hasil inventarisasi Inovasi Daerah yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah dan masih berjalan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13
Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah
Tahun 2024

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	JALAKOTEK RAHARJA	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SMART (Sistem Manajemen Asn Rinci Dan Terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik
3	Dinas Pendidikan	SIPENDIRU (Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cemilan Anak La Madu (Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Melalui Posyandu)	Inovasi pelayanan publik
		SIKAKA (Pensiunan Memperoleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik)	Inovasi pelayanan publik
		PAS ADA (Pemberian Administrasi Kependudukan Sebelum Diminta Warga)	Inovasi pelayanan publik
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Webinar KenCAN Data (Kenali, Cukupi, dan Analisis Nilai Data)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		Visualisasi BeStiE Data (Bewara Statistik dan Edukasi Data)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		Visualisasi Basajan (Bewara Siber Majalengka)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
		Webinar Super Kami (Seputar Siber dan Keamanan Informasi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6	Badan Pendapatan Daerah	GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Pajak dan Tertib Administrasi)	Inovasi pelayanan publik
		PESONA PATRIOT (Pelayanan Sosialisasi dan Edukasi Pajak Daerah Kepada Pelajar, Mahasiswa, Perhimpunan, Komunitas dan Organisasi)	Inovasi pelayanan publik
		LAMAN ASIK (LAYanan kepada Masyarakat taNpa Melanggar Protokol Kesehatan)	Inovasi pelayanan publik
		LAPAK RAHARJA (Layanan Pajak Daerah Terpadu untuk Majalengka Raharja)	Inovasi pelayanan publik
		PESIR ONLINE (Peta Potensi Pajak Daerah Online)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
		SIMPEL PBB (Sistem Pengelolaan PBB)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
		INTEGRITAS (Sistem Informasi Terpadu untuk Monitoring Pajak Daerah)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
		LAPAK ELIT (Laporan Pajak Elektronik berbasis IT)	Inovasi pelayanan publik
7	UPTD Puskesmas Banjaran	LATO-LATO (Layanan Aktif dan Totalitas LASKAR TOGA)	Inovasi pelayanan publik
8	UPTD Puskesmas Kertajati	SIMASKOT (Deteksi Dini Kesehatan Masyarakat Secara Terpadu dan Komprehensif) di	Inovasi pelayanan publik
		GEROBAK PELITA SI DIA (Gerakan Obat Keluarga Peduli Penderita Hipertensi Dan Diabetes Melitus)	Inovasi pelayanan publik
9	UPTD Puskesmas Cigasong	GULA CAKAR HITS (Gerakan dan Usaha Lanjutan Cari Kasus Hipertensi)	Inovasi pelayanan publik
10	UPTD Puskesmas Maja	ELING DA PENTING (Edukasi Peduli Stunting dan Pelayanan Anak Stunting)	Inovasi pelayanan publik
		HANARAGA (Penyuluhan dan Aksi Ramuan TOGA)	Inovasi pelayanan publik

11	UPTD Puskesmas Ligung	SIKASEP MEMBARA (Aksi Keluarga Sehat Enyahkan Penyakit Menuju Majalengka Bagja Raharja)	Inovasi pelayanan publik
12	UPTD Puskesmas Sukahaji	GEBOY TETI (Gerakan Edukasi Bagi Orang Yang Tensi Tinggi)	Inovasi pelayanan publik
13	UPTD Puskesmas Lemahsugih	ANTING EMAS (Atasi Stunting Sedari Dini Bersama Masyarakat)	Inovasi pelayanan publik
		GEROBAK SEHAT (Gerakan Menanam Tanaman Obat Keluarga Menuju Keluarga Sehat)	Inovasi pelayanan publik
14	UPTD Puskesmas Jatitujuh	SICEPAT KILAT (Sistem Colaborasi Edukasi Penanggulangan AIDS Terpadu Berbasis Kinerja Lapangan Tepat Sasaran)	Inovasi pelayanan publik
		BERLIAN SETUMPUK (Bersinergi Lintas Program dan Lintas Sektor Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas)	Inovasi pelayanan publik
		KAPUJA MELATI (Karyawan Puskesmas Jatitujuh Melak Toga Hiji)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
15	UPTD Puskesmas Loji	GEMILANG BERSERI (GERakan MInum teh bunga teLANG BERSama SEhat setiap haRI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
16	UPTD Puskesmas Argapura	4M TOGA (Mengenali, Menanam, Merawat Dan Mengolah Taman Obat Keluarga)	Inovasi pelayanan publik
17	UPTD Puskesmas Malausma	KUDU GETOL (Kecamatan Malausma Peduli Gerakan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
18	UPTD Puskesmas Majalengka	SEDALAM HATI (Sehat Dari Dalam Hidupkan Asuhan Mandiri Terintegrasi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
		GELORA BERSINAR (Gerak Olahraga Bersama Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular)	Inovasi pelayanan publik
19	UPTD Puskesmas Sindangwangi	AMANAT LURAH (Manfaatkan Tanaman Obat Di Halaman Rumah)	Inovasi pelayanan publik
20	UPTD Puskesmas Balida	PANTO GARASI (Peningkatan pengetahuan AN Tanaman Obat keluarGA dengan caRA edukaSI)	Inovasi pelayanan publik
21	UPTD Puskesmas Waringin	QUICK WIN (Penyediaan Donor Darah)	Inovasi pelayanan publik
22	UPTD Puskesmas Sukamulya	Bubur Sum- sum Kuah Jahe Merah Makanan Tradisional Kaya Antioksidan dan Penghangat Tubuh	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
23	UPTD Puskesmas Cingambul	SIMETOGA (Sistem Melak Tanaman Obat Keluarga)	Inovasi pelayanan publik
24	UPTD Puskesmas Kasokandel	BIT REMATRI CERIA (BIT Remaja Putri Cegah Anemia)	Inovasi pelayanan publik
25	UPTD Puskesmas Panongan	GEBRAK MANIS (Gerakan Obat Keluarga Mengatasi Penyakit Kronis)	Inovasi pelayanan publik
26	UPTD Puskesmas Cikijing	Minjam Berbulan Dan Bertamu Di Ramadhan	Inovasi pelayanan publik
27	UPTD Puskesmas Talaga	KADUPAK (Kegiatan Anc Terpadu Pada Kunjungan Ibu Hamil K6)	Inovasi pelayanan publik
28	Kecamatan Panyingkiran	PANYAMBAT (Panyingkiran Bersahabat)	Inovasi pelayanan publik
29	Kecamatan Maja	LAFOR WA KESOS (Layanan inFormasi beRbasis Whatsapp Auto KEsejahteraan SOSial)	Inovasi pelayanan publik
30	Kecamatan Palasah	Percepatan Aktivasi IKD	Inovasi pelayanan publik
		PELAMINAN PALASAH (Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasangan Baru Palasah)	Inovasi pelayanan publik

Sumber data Bappedalitbang Kabupaten Majalengka 2024

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada website www.majalengkakab.go.id.

Majalengka, Maret 2025
BUPATI MAJALENGKA

H. EMAN SUHERMAN